

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Program Jakwifi Tak Jelas dan tak Optimal

◆ Pengajuan Anggaran Rp275 Miliar Terancam Dinolkan

JAKARTA (Poskota)

- Setelah jalur sepeda yang menjadi sorotan karena dianggap menghambur-hamburkan anggaran dan dinilai tak berfungsi, kini giliran anggaran untuk program Jakwifi yang dipertanyakan. Pasalnya, untuk program tersebut, untuk pengadaan Jakwifi, Pemprov DKI menganggarkan Rp275 miliar.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin yang mempertanyakan program Jakwifi yang digarap Pemerintah Provinsi DKI. Ia menilai, sejak diluncurkan pada 2020

lalu, program penyediaan wifi gratis di sejumlah titik itu tak berjalan optimal. "Tiap saya turun, enggak ada yang tahu tuh masyarakat apa program Jakwifi," kata yang dikutip Selasa (15/11).

Bukan hanya masyarakat yang mengaku tak mengetahui progt Jakwifi, namun tampaknya ada yang ditutup-tutupi. Pasalnya, data dimana saja lokasi yang terpasang Jakwifi juga tak jelas. "Sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data foto di mana-mana saja enggak ada," kata Syarifudin.

Mengacu dari hal itu, Syarifudin pun protes kini Pemprov DKI kembali menganggarkan Rp 275 Miliar di RAPBD 2023 untuk menambah Jakwifi di sejumlah titik. Ia pun mengusulkan anggaran itu sebaiknya dihapus saja dan program Jakwifi dihentikan. "Jadi penambahan tahun 2023, saya rekomendasi dihapus aja pimpinan," ujarnya.

Ditambahkan Syarifudin, kehadiran Jakwifi juga tak berpengaruh bagi para pejalan, karena sekolah-sekolah juga sudah menerapkan tatap muka 100 persen.

"Sementara Jakwifi sebetulnya program untuk sekolah yang dirumahkan," ucap Syarifudin.

Karena besarnya anggaran dan data yang tak jelas, Syarifudin pun mengusulkan agar anggaran penambahan titik Jakwifi pada 2023 dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). "Maksud saya, BLT BBM kebagian 1 RT paling Rp7-10 juta. Lebih baik dialihin ke situ, dampaknya lebih signifikan," tukasnya.

Sebelumnya diketahui, jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Jakarta yang disorot, karena dianggap buang

anggaran dan tak berfungsi, akhirnya tinggal cerita. Pasalnya, DPRD DKI akan menghapus anggaran pembangunan lanjutan di tahun 2023 mendatang.

Komisi B DPRD-DKI Jakarta berencana menghilangkan program pembangunan jalur sepeda yang jadi warisan Gubernur Anies Baswedan di tahun 2023 mendatang. Anggaran Rp38 Miliar yang sudah dialokasikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di APBD 2023 pun bakal dinolkan.

Penghapusan program pembangunan

jalur sepeda itu pun menimbulkan reaksi dari beberapa legislator. Salah satunya anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MRZ) yang mengaku sangat mengecam hal tersebut.

"Saya beda pendapat dengan anggota Komisi B lainnya, jalur sepeda disertai pedestrian yang lebar kemudian juga peningkatan sarana transportasi publik di Jakarta itu merupakan solusi yang elegan dari gubernur sebelumnya untuk mengatasi kemacetan Jakarta," katanya, Senin (14/11). (*/lfn)